



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 116 A /KEP/HK/2022**

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*,
ANGKA KEMATIAN IBU DAN ANGKA KEMATIAN BAYI
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022-2023**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 115A/KEP/HK/2022 telah ditetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa selain Prevalensi *Stunting*, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) sudah menjadi target indikator makro pembangunan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023 dan *Sustainable Development Goals*;
- c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) sebagaimana dimaksud pada huruf a sekaligus dalam rangka percepatan penurunan Prevalensi *Stunting*, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk Kelompok Kerja yang keanggotaannya berasal dari lintas sektor, lintas organisasi dan pemangku kepentingan lainnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Percepatan Penurunan *Stunting*, Angka Kematian Ibu Dan Angka Kematian Bayi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022-2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 115A/KEP/HK/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

- :
: Kelompok Kerja Percepatan Penurunan *Stunting*, Angka Kematian Ibu Dan Angka Kematian Bayi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022-2023.

KEDUA

- : Tugas dari Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan penurunan *Stunting*, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) secara efektif, konvergen dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi;
 - memfasilitasi pembinaan, pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut atas kebijakan dan pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran percepatan penurunan *Stunting*, AKI dan AKB di Provinsi NTT;
 - memfasilitasi dukungan teknis bagi peningkatan kapasitas kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* di Provinsi NTT;
 - melakukan penilaian kinerja kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - mengoordinasikan pelibatan kelembagaan nonpemerintah untuk mendukung percepatan penurunan *Stunting*, AKI, AKB di Provinsi NTT;
 - melakukan advokasi hasil rekomendasi Audit *Maternal Perinatal* pada Kabupaten/Kota; dan
 - memfasilitasi proses legalisasi jaringan rujukan antar kabupaten/kota dan memastikan kebijakan jaringan rujukan tersebut dapat dilaksanakan.

KETIGA

- : Susunan anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT

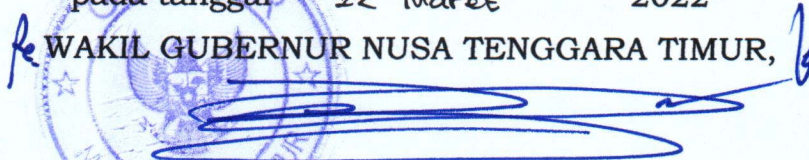
- : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Wakil Gubernur selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KELIMA ...

- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 Maret 2022

Re. WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
6. Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT di Kupang;
7. Anggota Kelompok Kerja masing-masing di Tempat. †

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 116A /KEP/HK/2022

TANGGAL : 22 Maret 2022

TENTANG SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*, ANGKA KEMATIAN IBU DAN ANGKA KEMATIAN BAYI DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022-2023

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS	OUTPUT
1.	Ir. Sarah Lery Mboeik/LSM PIAR	Ketua	a. memberikan masukan rumusan kebijakan terkait dengan <i>stunting</i> , Kesehatan ibu dan bayi; dan b. melakukan sosialisasi advokasi terkait <i>stunting</i> , kesehatan ibu dan bayi.	a. adanya masukan rumusan kebijakan terkait dengan <i>stunting</i> , kesehatan ibu dan bayi; dan b. adanya sosialisasi advokasi terkait <i>stunting</i> , kesehatan ibu dan bayi.
2.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Wakil Ketua 1		
3.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Wakil Ketua 2		
4.	Yustina Yudha Nita/ MOMENTUM Perwakilan Kupang	Sekretaris 1	Mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta bertanggung jawab dalam penyusunan laporan tahunan.	Adanya dukungan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta bertanggung jawab dalam penyusunan laporan tahunan.
5.	Sylvia Fanggalda/MOMENTUM Perwakilan Kupang	Sekretaris 2		
6.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota/Pengelola Keuangan	Memberikan dukungan anggaran untuk mendukung percepatan penurunan <i>stunting</i> , AKI dan AKB.	Adanya dukungan anggaran untuk mendukung percepatan penurunan <i>stunting</i> , AKI dan AKB.
7.	Dr. Intje Picauly, M.Si/ Program Pasca Sarjana Universitas Nusa Cendana	Anggota/Pakar Gizi	Memberikan masukan rumusan kebijakan terkait dengan Pencegahan dan Penanganan <i>Stunting</i> .	Adanya masukan rumusan kebijakan terkait dengan Pencegahan dan Penanganan <i>Stunting</i> .
8.	Dr. Laurens Paulus, SpOG/Ketua POGI NTT /RSUD Prof. DR.W.Z.Johannes Kupang	Anggota/Praktisi Kesehatan Ibu dan Bayi	Memberikan masukan rumusan kebijakan terkait dengan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir.	Adanya masukan rumusan kebijakan terkait dengan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir.
9.	Dr. Irene K.L.A. Davidz, Sp.A. M.Kes/Ketua Bidang Ilmiah IDAI NTT/RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang			

10.	DR. David B. W. Pandie, MS/Staf Khusus Gubernur Bidang Kebijakan Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 bidang keahlian Pemerintahan dan Organisasi.	Anggota	Memberikan masukan rumusan kebijakan terkait dengan <i>Stunting</i> dan Kesehatan Ibu dan Bayi.	Adanya masukan rumusan kebijakan terkait dengan <i>Stunting</i> , Kesehatan Ibu dan Bayi.
11.	dr. Stefanus Bria Seran, MPH, / Staf Khusus Gubernur Bidang Kebijakan Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023bidang keahlian Penanganan Kesehatan			
12.	Norman Riwukaho/Universitas Nusa Cendana	Anggota/Pakar Database	Memberikan bantuan teknis untuk pengembangan data base.	Adanya bantuan teknis untuk pengembangan data base.
13.	Matheos Viktor Messakh/Universitas Nusa Cendana	Anggota/Pakar Database dan Publikasi		
14.	Ronald Raya, SKM / Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota/Pengelola Data Kesehatan ibu dan Anak	Memberikan bantuan teknis untuk pengelolaan data Kesehatan Ibu dan Anak.	Adanya bantuan teknis untuk pengelolaan data Kesehatan Ibu dan Anak.
15.	Raymundus V Umbu, SKM / Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota/Pengelola Data Gizi	Memberikan bantuan teknis untuk pengelolaan data Gizi.	Adanya bantuan teknis untuk pengelolaan data Gizi.

a. Bidang Penurunan AKI dan AKB				
1.	Sub Koordinator Kesga, Gizi dan KB pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Koordinator	Mengkoordinir seluruh kegiatan terkait penurunan AKI dan AKB.	Terkoordinasinya seluruh kegiatan terkait penurunan AKI dan AKB.
2.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan untuk peningkatan system rujukan dalam rangka penurunan AKI dan AKB.	Tersedianya masukan untuk peningkatan system rujukan dalam rangka penurunan AKI dan AKB.
3.	Sub Koordinator Pembangunan Manusia pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Mendukung perencanaan dan penganggaran untuk penurunan AKI dan AKB.	Tersedianya dukungan perencanaan dan penganggaran untuk penurunan AKI dan AKB.
4.	Koordinator Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi pada Perwakilan BKKBN Provinsi NTT	Anggota	Mendukung dan memberikan masukan terkait pembinaan keluarga Balita.	Tersedianya dukungan dan memberikan masukan terkait pembinaan keluarga Balita.
5.	Kepala Bidang KPPM pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan terhadap penyusunan strategi Pemberdayaan dan pergerakan Masyarakat untuk penurunan AKI dan AKB.	Tersedianya masukan terhadap penyusunan strategi Pemberdayaan dan pergerakan Masyarakat untuk penurunan AKI dan AKB.
6.	Kepala Bidang Kelembagaan Gender dan Kemitraan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan terhadap penyusunan strategi Pemberdayaan dan pergerakan Masyarakat untuk penurunan AKI dan AKB.	Tersedianya masukan terhadap penyusunan strategi Pemberdayaan dan pergerakan Masyarakat untuk penurunan AKI dan AKB.
7.	Ketua Pokja IV pada TP PKK Provinsi NTT Periode 2018-2023	Anggota	Memberikan masukan terhadap penyusunan strategi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga.	Tersedianya masukan terhadap penyusunan strategi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga.
8.	Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat UNDANA NTT	Anggota	Memberikan bantuan teknis terkait dengan penurunan AKI dan AKB.	Tersedianya bantuan teknis terkait dengan penurunan AKI dan AKB.

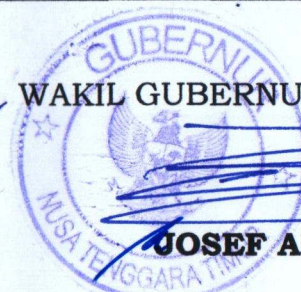
9.	Ketua POGI NTT	Anggota	Memberikan bantuan teknis klinis untuk pelayanan kesehatan ibu.	Tersedianya bantuan teknis klinis untuk pelayanan kesehatan ibu.
10.	Ketua IDAI NTT			
11.	Ketua IBI NTT			
12.	Pimpinan MOMENTUM Perwakilan Kupang	Anggota	Memberikan bantuan teknis terkait dengan penurunan AKI dan AKB.	Tersedianya bantuan teknis terkait dengan penurunan AKI dan AKB.
13.	Pimpinan UNICEF Perwakilan Kupang			
14.	Pimpinan <i>Save The Children</i> Perwakilan Kupang			

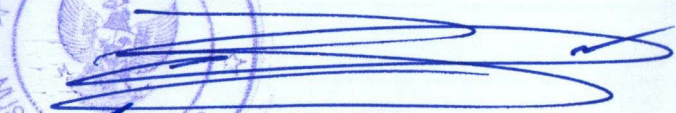
b. Bidang Percepatan Penurunan Stunting

1.	Sub Koordinator Pembangunan Manusia pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Koordinator	Mengoordinir seluruh kegiatan terkait dengan percepatan dan penurunan <i>stunting</i> .	Terkoordinasinya seluruh kegiatan terkait dengan percepatan dan penurunan <i>stunting</i> .
2.	Sub Koordinator Kesga, Gizi dan KB pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Koordinator	Memberikan masukan tentang kesehatan ibu dan bayi yang mendukung percepatan penurunan dan penanganan <i>stunting</i> .	Tersedianya masukan tentang kesehatan ibu dan bayi yang mendukung percepatan penurunan dan penanganan <i>stunting</i> .
3.	Kepala Bidang KPPM pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan terhadap penyusunan strategi Pemberdayaan dan penggerakan Masyarakat untuk percepatan penurunan <i>stunting</i> .	Tersedianya masukan terhadap penyusunan strategi Pemberdayaan dan penggerakan Masyarakat untuk percepatan penurunan <i>stunting</i> .
4.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	Memberikan dukungan dan bantuan teknis terkait jaminan dan dukungan social ke masyarakat untuk percepatan penurunan <i>stunting</i> .	Tersedianya dukungan dan bantuan teknis terkait jaminan dan dukungan social ke masyarakat untuk percepatan penurunan <i>stunting</i> .
5.	Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga pda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan terhadap penyusunan strategi Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak dalam rangka percepatan penurunan <i>stunting</i> .	Tersedianya masukan terhadap penyusunan strategi Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak dalam rangka pencegahan dan penanganan <i>stunting</i> .

6.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPR Provinsi NTT	Anggota	Memberikan dukungan untuk memastikan ketersediaan air bersih dan sarana sanitasi.	Tersedianya dukungan untuk memastikan ketersediaan air bersih dan sarana sanitasi.
7.	Kepala Bidang Infrastruktur Jaringan dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	Memberikan dukungan untuk penyebaran informasi terkait pencegahan dan penanganan <i>stunting</i> .	Tersedianya dukungan untuk penyebaran informasi terkait pencegahan dan penanganan <i>stunting</i> .
8.	Kepala Bidang Dukcapil pada Dinas Kehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	Memberikan dukungan untuk memastikan keluarga 1000 HPK memiliki dokumen kependudukan.	Tersedianya dukungan untuk memastikan keluarga 1000 HPK memiliki dokumen kependudukan.
9.	Ketua Pokja IV pada TP PKK Provinsi NTT Periode 2018-2023	Anggota	Memberikan dukungan untuk kesejahteraan keluarga.	Tersedianya dukungan untuk kesejahteraan keluarga.
10.	Kepala Bidang Budidaya dan Ruang Laut pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	Memberikan dukungan terkait dengan perikanan.	Tersedianya dukungan terkait dengan perikanan.
11.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Provinsi NTT	Anggota	Memberikan dukungan terkait dengan ketahanan pangan dan pertanian.	Tersedianya dukungan terkait dengan ketahanan pangan dan pertanian.
12.	Kepala Bidang Pembibitan dan Produksi Ternak pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	Memberikan dukungan dan masukan untuk pengembangan ketersediaan peternakan untuk ketahanan keluarga 1000 HPK.	Tersedianya dukungan dan masukan untuk pengembangan ketersediaan peternakan untuk ketahanan keluarga 1000 HPK.
13.	Sub Koordinator Bina Keluarga Balita, Anak dan Ketahanan Keluarga Lansia pada Perwakilan BKKBN Provinsi NTT	Anggota	Memberikan dukungan dan masukan untuk pembinaan keluarga balita.	Tersedianya dukungan dan masukan untuk pembinaan keluarga balita.

c. Bidang Sekretariat			
1.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Koordinator	<p>a. mengoordinir pelaksanaan administrasi kelompok kerja Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>, AKI dan AKB;</p> <p>b. melaksanakan koordinasi dengan perangkat Daerah terkait dalam hal mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>, AKI dan AKB; dan</p> <p>c. menyusun laporan pelaksanaan kelompok kerja percepatan penurunan <i>Stunting</i>, AKI dan AKB.</p>
2.	Sub Koordinator Pembangunan Manusia pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Sekretaris	<p>a. terkoordinirnya pelaksanaan administrasi kelompok kerja Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>, AKI dan AKB;</p> <p>b. terlaksananya koordinasi dengan perangkat Daerah terkait dalam hal mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>, AKI dan AKB; dan</p> <p>c. tersusunnya laporan pelaksanaan kelompok kerja percepatan penurunan <i>Stunting</i>, AKI dan AKB.</p>
3.	Vince B. Panggula, SKM/Fungsional Perencana Ahli Madya pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
4.	Siti Romlah, SKM, M.Kes/ Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
5.	Scherly Hayer, S.Gz/Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	


 WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI